



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I Nyoman Aryawibawa
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 674183

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.175.000.000**

1. Tanah Seluas 5.180 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.080.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 1.095 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 7.140 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.775.000.000
5. Tanah Seluas 3.650 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 912.500.000
6. Tanah Seluas 4.700 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.175.000.000
7. Tanah Seluas 4.850 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.212.500.000
8. Tanah Seluas 146 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
9. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **17.000.000**



1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	181.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	95.922.826
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.469.422.826

III. HUTANG Rp. 308.757.990

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.160.664.836

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.